

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
KREDIT MIKRO NAGARI (KMN)  
Studi Kasus: Sistem Pinjaman Modal Bergulir Di Nagari  
Toboh Ketek, Kab. Padang Pariaman**

**OLEH :**

**IRVAN  
04115003**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
KREDIT MIKRO NAGARI (KMN)  
Studi Kasus: Sistem Pinjaman Modal Bergulir di Nagari  
Toboh Ketek, Kab. Padang Pariaman**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui efektifitas pelaksanaan program kredit mikro nagari (KMN) dengan sistem pinjaman modal bergulir di Nagari Toboh Ketek, (2) Mengetahui tingkat kemampuan masyarakat/kelompok penerima kredit dalam pengembalian dana kredit mikro nagari, (3) Mengetahui ketepatan penggunaan dana kredit oleh masyarakat penerima program KMN. Penelitian ini dilaksanakan di Kenagarian Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi kasus dengan teknik pengambilan responden dilakukan secara sensus.

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan informan kunci yaitu Badan Musyarawah Nagari, Walinagari, Tim Pelaksana Program (Pokja Nagari) dan daftar pertanyaan untuk responden. Data penelitian dianalisis dengan analisa kualitatif terhadap tiga tujuan tersebut berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan program dilapangan sebagai acuan.

Hasil penelitian menunjukkan Program kredit mikro di Nagari Toboh Ketek yang digulirkan sejak Februari 2008 s.d. Februari 2009 telah berhasil meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan unit usaha, Hal ini terbukti dari hasil pengujian Uji-t, terdapat pengaruh program kredit mikro terhadap peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan unit usaha. Selanjutnya tingkat kemampuan masyarakat penerima dana kredit dalam pengembalian dana kredit mikro sampai Februari 2009 di Nagari Toboh Ketek yang dilihat dari jumlah dana pinjaman, jangka waktu pengembalian dana, jumlah dana yang telah dikembalikan, ketepatan waktu pengembalian dana, mekanisme pengembalian kredit adalah rendah yakni 2,38%. Kemudian ketepatan penggunaan dana kredit mikro oleh masyarakat/kelompok penerima program KMN sudah tepat berdasarkan dengan kriteria penerima dana kredit, kriteria jenis usaha dan perguliran dana kredit, hal ini terbukti 100% (42 orang responden tepat penggunaan dana kredit mereka dengan kriteria penerima dana dan perguliran dana kredit) dan 59,52% (25 orang responden telah tepat dengan kriteria jenis usaha), serta 40,47% (17 orang merasa usaha yang mereka jalan kurang cepat menghasilkan keuntungan).

Dari hasil penelitian ini disarankan Pokja Nagari bisa lebih intensif lagi dalam melakukan koordinasi dengan lembaga lokal yang ada di Nagari, serta harus adanya transparansi, publikasi dan penerapan regulasi secara berkelanjutan. Pemerintah sebaiknya melakukan pemantauan kelapangan dan tidak hanya mengandalkan laporan triwulan dari Pokja Nagari saja untuk mengevaluasi pelaksanaan program KMN di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman, agar program kredit mikro dapat terus berlanjut.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Hakekatnya belum ada keberlanjutan (*sustainability*) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Penanggulangan kemiskinan selama ini telah ditangani melalui kebijakan dan mekanisme, misalnya bantuan langsung tunai (BLT), tetapi kurang efektif karena banyak yang salah sasaran, bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana hingga berakibat konflik sosial (Pattinama, 2009).

Persoalan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan jumlah penduduk miskin yang cukup besar sebagai akibat dari krisis multidimensi pada tahun 1997–2000 dan terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak tahun 2005. Pada tahun 2006, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 12,50 % relatif meningkat bila dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2005 sebesar 10,04%. Pada tahun 2007, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan telah mencapai 1,6 juta orang dari 4.450.000 penduduk. Kegagalan dalam program pengentasan kemiskinan selama ini bisa jadi disebabkan karena informasi mengenai penduduk miskin yang diolah berdasarkan data modul konsumsi survei sosial ekonomi nasional yang hanya bersifat makro. Kondisi ini menjadi kendala bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan program pengentasan kemiskinan sehingga tidak berdampak secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin (Syafii, 2007).

Berdasarkan 14 indikator sosial ekonomi rumah tangga, pada tahun 2007 tercatat 25,24 % Rumah Tangga Miskin di Sumatera Barat yang memerlukan bantuan melalui berbagai program yang sumber pembiayaannya berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta bantuan dari masyarakat dan pihak swasta (BPM, 2008). Besarnya jumlah penduduk miskin di Provinsi

Sumatera Barat cukup mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah Daerah Sumatera Barat meluncurkan sebuah program penanggulangan kemiskinan yang berbasiskan Nagari yang memberikan harapan bagi Pemerintah pada level bawah (Nagari) mampu untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di pedesaan. Program penanggulangan kemiskinan tersebut memiliki menu kegiatan penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui pinjaman modal usaha yang bersifat bergulir. Pemanfaatan kegiatan penanggulangan kemiskinan saat ini di pedesaan melalui kegiatan Program Kredit Mikro Nagari (KMN). Program penanggulangan kemiskinan tersebut ditujukan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan pemberian pinjaman dana bergulir untuk modal usaha yang akan meningkatkan usaha ekonomi masyarakat miskin (Syahrial, 2008)

Pemberdayaan masyarakat miskin di era otonomi daerah merupakan suatu upaya menggali dan memanfaatkan potensi yang ada pada diri mereka dengan tujuan meningkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha dengan sistem dana bergulir. Selama ini upaya pemberdayaan masyarakat miskin tersebut telah di implementasikan dalam berbagai program seperti: Bangdes, Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan hampir semua departemen mempunyai program penanggulangan kemiskinan.

Program KMN merupakan program penanggulangan kemiskinan yang khusus dirancang oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka implementasi agenda pembangunan yaitu agenda ke 6 (enam), "*Mempercepat Penurunan Tingkat Kemiskinan*" yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010, maka salah satu upaya penurunan tingkat kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Provinsi adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin melalui penyediaan kredit mikro Nagari (KMN) sebagai tambahan modal usaha, dimana sumber pembiayaan

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Program kredit mikro di Nagari Toboh Ketek yang digulirkan sejak Februari 2008 s.d. Februari 2009 telah berhasil meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan unit usaha, Hal ini terbukti dari hasil pengujian Uji-t, terdapat pengaruh program kredit mikro terhadap peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan unit usaha.
2. Tingkat kemampuan masyarakat penerima dana kredit dalam pengembalian dana kredit mikro sampai Februari 2009 di Nagari Toboh Ketek yang dilihat dari jumlah dana pinjaman, jangka waktu pengembalian dana, jumlah dana yang telah dikembalikan, ketepatan waktu pengembalian dana, mekanisme pengembalian kredit adalah rendah yakni 2,38%.
3. Ketepatan penggunaan dana kredit mikro oleh masyarakat/kelompok penerima program KMN sudah tepat berdasarkan dengan kriteria penerima dana kredit, kriteria jenis usaha dan perguliran dana kredit, hal ini terbukti 100% (42 orang responden tepat penggunaan dana kredit mereka dengan kriteria penerima dana dan perguliran dana kredit) dan 59,52% (25 orang responden telah tepat dengan kriteria jenis usaha), serta 40,47% (17 orang merasa usaha yang mereka jalan kurang cepat menghasilkan keuntungan)

### 5.2 Saran

Ada beberapa poin penting yang dapat disarankan oleh peneliti yaitu :

1. Pokja Nagari harus lebih intensif lagi dalam melakukan koordinasi dengan lembaga lokal yang ada di Nagari, serta harus adanya transparansi, publikasi dan penerapan regulasi secara berkelanjutan.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan pemantauan kelapangan dan tidak hanya mengandalkan laporan triwulan dari Pokja Nagari saja untuk mengevaluasi pelaksanaan program KMN di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman, agar program kredit mikro dapat terus berlanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dan Kebijakan Pengembangannya*. [Jurnal]. Agroekonomi, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Hal 146-164.
- Anugrah, Iwan Setiajje dan Erma Suryani. 2007. *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Perspektif Kemiskinan Berkelanjutan*. [Jurnal]. Agroekonomi, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Bappenas. 2007. *Program-Program Sektor Pertanian yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan*. Badan Pengembangan SDM Pertanian, Deptan
- Daniel, Moehar. 2004. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dewi, Weni Zetrika. 2008. *Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari Tahun Anggaran 2007 Di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman (studi kasus masyarakat penerima kredit mikro nagari di parit malintang kab.padang pariaman)*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Ekaputra, Muhammad Topan. 2002. *Analisis Program Bantuan Dana Bergulir (Revolving Fund) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Solok*. [Tesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. 65 hal.
- Gustina, Wilda. 2007. *Analisis Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Melalui Pinjaman Bergulir Di Kota Payakumbuh*. [Skripsi]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Pada Naskah Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta Naskah No. 20, Juni-Juli 2000. <http://www.bappenas.go.id> [23 Juli 2008].